

ANALISIS STRATEGI BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN KETERLIBATAN MASYARAKAT PASCA IMPLEMENTASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Angga Pranata^{1*}, Ida Farida²

^{1,2} Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung

ARTICLE INFO

Received Januari 2025

Revised Januari 2025

Accepted Januari 2025

Available online Januari 2025

Kata Kunci:

pelayanan informasi publik; keterlibatan masyarakat; strategi legislatif; tata kelola; Provinsi Lampung.

Keywords:

public information services; community involvement; legislative strategies; governance; Lampung Province



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis strategi yang diterapkan oleh Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat pasca-implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji lima dimensi strategi berdasarkan kerangka teori Henry Mintzberg: perencanaan, manuver, pola tindakan, posisi, dan perspektif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun strategi yang diterapkan telah meningkatkan partisipasi masyarakat, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan anggaran, distribusi informasi yang belum merata, dan aksesibilitas yang terbatas di daerah terpencil. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami strategi tata kelola pemerintahan dan menekankan pentingnya inklusivitas serta adaptabilitas dalam implementasi kebijakan. Rekomendasi praktis diberikan untuk meningkatkan efektivitas proses legislasi dan membangun lingkungan pemerintahan yang lebih partisipatif.

ABSTRACT

This research analyzes the strategies implemented by the Legislative Drafting Division of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Lampung Province in enhancing community involvement following the enactment of Regional Regulation

No. 7 of 2024 on Public Information Services. Employing a qualitative descriptive-analytical approach, the study examines five strategic dimensions from Henry Mintzberg's framework: plan, ploy, pattern, position, and perspective. Data was collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that while the strategies have increased community participation, challenges such as budget constraints, uneven information dissemination, and limited accessibility in remote areas persist. The research contributes to understanding public governance strategies and highlights the importance of inclusivity and adaptability in policy implementation. It offers practical recommendations for enhancing the effectiveness of legislative processes and fostering a participatory governance environment.

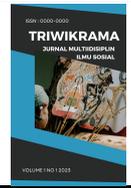
1. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik telah menjadi pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi ini dirancang untuk menjamin hak masyarakat atas informasi dan mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan publik. Di Provinsi Lampung, penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang dikelola oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Meski langkah ini telah membuka ruang partisipasi masyarakat, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada strategi yang diterapkan, khususnya oleh Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, yang bertanggung jawab atas penyusunan dan publikasi produk hukum.

Penelitian sebelumnya menyoroti bahwa strategi organisasi yang efektif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan (Kaplan & Norton, 2018). Mintzberg (1987) menawarkan kerangka lima dimensi strategi, yaitu plan, ploy, pattern, position, dan perspective, yang relevan untuk memahami dinamika strategi di sektor publik. Meski strategi ini telah terbukti mendukung implementasi kebijakan di berbagai konteks, masih terdapat celah dalam pemahaman mengenai aplikasinya dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, khususnya di tingkat lokal. Fenomena keterbatasan distribusi informasi, rendahnya partisipasi masyarakat di daerah terpencil, serta tantangan dalam alokasi sumber daya menjadi alasan utama perlunya penelitian ini. Studi ini bermaksud menganalisis strategi Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat pasca-

*Angga.211110126@student.uabl.ac.id

E-mail addresses: ida.farida@uabl.ac.id



implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024, dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas strategi tersebut.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoretis pada literatur strategi organisasi di sektor publik, serta menawarkan rekomendasi praktis bagi DPRD Provinsi Lampung dan badan publik lainnya dalam memperkuat keterlibatan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif di masa depan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat pasca-implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan konteks strategi organisasi melalui eksplorasi pandangan, pengalaman, dan interpretasi dari pihak-pihak terkait. Penelitian dilaksanakan di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dengan waktu pelaksanaan dari November 2024 hingga Januari 2025.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber kunci, termasuk Kepala Bagian Perundang-Undangan, anggota Komisi I DPRD, dan masyarakat yang terlibat dalam implementasi Perda. Observasi langsung digunakan untuk mengamati pola interaksi antara DPRD dan masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan terkait pelayanan informasi publik. Studi dokumentasi mencakup analisis terhadap produk hukum, laporan kegiatan, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2024.

Teknik analisis data dilakukan secara tematik dengan menggunakan pendekatan analisis konten. Proses analisis melibatkan transkripsi wawancara, pengkodean data berdasarkan tema utama, dan interpretasi temuan dalam kerangka teori strategi Henry Mintzberg, yang mencakup lima dimensi strategi: plan, ploy, pattern, position, dan perspective. Hasil analisis diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait strategi yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap keterlibatan masyarakat.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, metode, dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi metode memastikan konsistensi temuan melalui penggunaan teknik pengumpulan data yang beragam. Triangulasi teori mengacu pada penggunaan kerangka teori yang relevan untuk menganalisis data, termasuk teori keterlibatan masyarakat dan teori strategi organisasi.

Rancangan analisis data mengikuti prosedur sistematis, dimulai dari identifikasi tema utama, pengkodean data, analisis hubungan antar tema, hingga penyusunan narasi temuan. Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek etis, seperti menjaga kerahasiaan informan, memperoleh persetujuan partisipasi secara sukarela, dan menggunakan data secara anonim. Dengan prosedur ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang holistik mengenai strategi organisasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

3. HASIL

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat pasca-implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024. Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Temuan penelitian disajikan berdasarkan lima dimensi strategi menurut Henry Mintzberg, yaitu plan, ploy, pattern, position, dan perspective.

Plan (Perencanaan)

Perencanaan yang dilakukan oleh Bagian Perundang-Undangan menunjukkan upaya untuk melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal dalam penyusunan strategi sosialisasi Perda. Tabel berikut menunjukkan aktivitas perencanaan yang telah dilaksanakan.

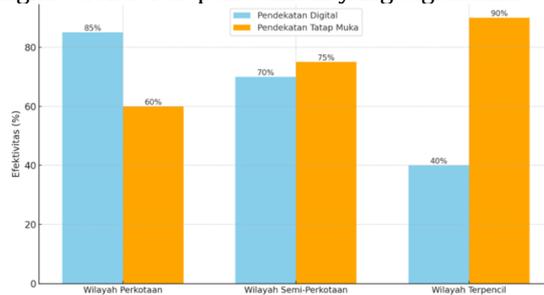
Tabel 1. Hasil dan Tantangan Dimensi Plan (Perencanaan)

Kegiatan Perencanaan	Hasil yang Dicapai	Tantangan
Penyusunan Rencana Strategis	Dokumen rencana strategis yang mencakup target partisipasi	Keterbatasan anggaran dan sumber daya
Forum Diskusi dengan Pemangku Kepentingan	Masukan dari tokoh masyarakat dan akademisi	Kurangnya representasi dari masyarakat terpencil
Pengembangan Media Sosialisasi	Konten media digital seperti infografis dan video edukasi	Aksesibilitas masyarakat terhadap teknologi

Meskipun terdapat perencanaan yang sistematis, wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa informasi belum merata, terutama di wilayah terpencil. Hal ini mencerminkan perlunya strategi yang lebih inklusif untuk mencapai sasaran partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Ploy (Manuver)

Manuver yang dilakukan mencakup pelaksanaan sosialisasi melalui platform digital, seperti media sosial dan portal informasi resmi. Selain itu, pendekatan langsung, seperti diskusi di desa-desa terpencil, juga menjadi bagian dari strategi. Gambar berikut menggambarkan tingkat efektivitas pendekatan yang digunakan.



Gambar 1. Tingkat Efektivitas Pendekatan Sosialisasi

Grafik di atas menunjukkan tingkat efektivitas pendekatan sosialisasi menggunakan media digital dan tatap muka di berbagai wilayah. Wilayah perkotaan lebih efektif menggunakan pendekatan digital, sedangkan wilayah terpencil lebih berhasil dengan pendekatan tatap muka.

Pattern (Pola Tindakan)

Konsistensi dalam melibatkan masyarakat terlihat melalui pelaksanaan forum diskusi publik yang dilakukan secara berkala. Data observasi menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat meningkat setelah diterapkannya Perda Nomor 7 Tahun 2024, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Partisipasi Masyarakat dari tahun 2023/2024

Tahun	Jumlah Forum Diskusi	Rata-rata Partisipasi Masyarakat (Orang)
2023	10	35
2024	15	50

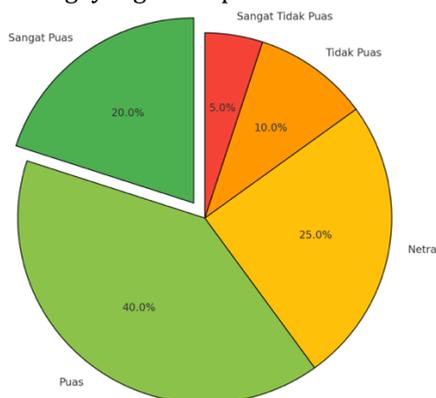
Peningkatan jumlah forum dan partisipasi masyarakat ini menunjukkan adanya pola keterlibatan yang lebih terstruktur. Namun, masyarakat menginginkan keterlibatan yang lebih bermakna, seperti pengambilan keputusan langsung terkait kebijakan publik.

Position (Posisi)

DPRD Provinsi Lampung memposisikan diri sebagai fasilitator keterlibatan masyarakat dengan menyediakan akses informasi melalui portal digital dan publikasi produk hukum. Namun, masyarakat yang diwawancarai merasa bahwa posisi mereka lebih sebagai objek sosialisasi dibandingkan sebagai mitra dalam pengambilan kebijakan. Hal ini menunjukkan perlunya perubahan dalam strategi komunikasi untuk memperkuat posisi masyarakat sebagai mitra strategis.

Perspective (Perspektif)

Pandangan pemerintah terhadap keterlibatan masyarakat menunjukkan optimisme terhadap kemajuan teknologi dalam mempermudah akses informasi. Namun, wawancara dengan masyarakat mengungkapkan perlunya pendekatan yang lebih langsung dan interaktif, terutama di wilayah yang belum terjangkau teknologi. Grafik berikut menunjukkan persepsi masyarakat terhadap efektivitas strategi yang diterapkan.



Gambar 2. Persepsi Masyarakat terhadap Efektivitas Strategi

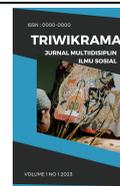


Diagram lingkaran di atas menunjukkan persepsi masyarakat terhadap efektivitas strategi DPRD Provinsi Lampung. Sebagian besar masyarakat merasa puas (40%) dan sangat puas (20%), sementara 25% bersikap netral. Sebagian kecil merasa tidak puas (10%) dan sangat tidak puas (5%).

4. PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat pasca-implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan mencakup lima dimensi menurut teori strategi Henry Mintzberg (plan, ploy, pattern, position, perspective), namun masing-masing dimensi menghadapi tantangan yang signifikan, yang jika diatasi dapat meningkatkan efektivitas keterlibatan masyarakat.

Strategi sebagai Plan: Perencanaan yang Sistematis tetapi Terbatas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagian Perundang-Undangan telah melakukan perencanaan yang sistematis, termasuk melibatkan pemangku kepentingan seperti akademisi, tokoh adat, dan masyarakat dalam forum diskusi. Perencanaan ini relevan dengan teori Mintzberg (1987), yang menekankan bahwa perencanaan adalah dasar untuk mengarahkan tindakan strategis organisasi. Namun, keterbatasan anggaran dan distribusi informasi yang tidak merata menghambat efektivitas strategi ini, terutama dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil.

Keterbatasan ini mendukung temuan Bryson (2018), yang menyatakan bahwa strategi publik sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan memerlukan fleksibilitas dalam perencanaan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis data dan teknologi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan jangkauan informasi, seperti melalui aplikasi mobile atau platform berbasis komunitas.

Strategi sebagai Ploy: Manuver Inovatif yang Memerlukan Penyesuaian

Pendekatan jemput bola dan penggunaan media sosial adalah langkah inovatif dalam menyebarluaskan informasi Perda. Namun, efektivitasnya bervariasi tergantung pada konteks lokal. Sebagai contoh, masyarakat di daerah perkotaan lebih merespons media digital, sementara di daerah terpencil, pendekatan langsung lebih efektif. Temuan ini memperkuat pandangan Hill, Jones, dan Schilling (2019), yang menyatakan bahwa strategi harus kontekstual dan adaptif terhadap kondisi lingkungan.

Namun, penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menekankan pentingnya fleksibilitas waktu dan media dalam pelaksanaan strategi komunikasi. Jadwal sosialisasi yang tidak sesuai dengan waktu luang masyarakat menjadi kendala yang sering muncul, menunjukkan perlunya integrasi waktu dan media yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Strategi sebagai Pattern: Pola Konsistensi yang Memerlukan Inklusi

Konsistensi dalam melibatkan masyarakat melalui forum diskusi dan survei publik adalah langkah positif yang diambil oleh DPRD. Pola ini sesuai dengan pandangan Wheelen et al. (2018), yang menyatakan bahwa pola tindakan yang konsisten mencerminkan komitmen organisasi terhadap implementasi strategi. Namun, pola ini belum mencakup seluruh lapisan masyarakat secara inklusif, terutama kelompok marjinal yang sering kali tidak terwakili.

Studi ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan bahwa pola keterlibatan yang lebih inklusif, seperti melibatkan komunitas lokal melalui pertemuan desa, dapat meningkatkan legitimasi dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik.

Strategi sebagai Position: Keterlibatan sebagai Mitra Strategis

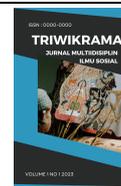
Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat diposisikan sebagai mitra strategis dalam implementasi Perda, tetapi sebagian besar masih merasa hanya sebagai penerima informasi, bukan sebagai pengambil keputusan. Temuan ini mendukung pandangan Grant (2019), yang menyatakan bahwa posisi strategis yang kuat harus mencerminkan keterlibatan masyarakat secara bermakna, tidak hanya secara formalitas.

Dengan memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, DPRD dapat memperkuat posisi masyarakat sebagai mitra sejati, bukan sekadar objek kebijakan. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi strategi komunikasi yang lebih dialogis dan partisipatif.

Strategi sebagai Perspective: Optimisme yang Memerlukan Pendekatan Progresif

Dari perspektif organisasi, pemerintah optimis bahwa teknologi informasi dapat menjadi solusi utama dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa optimisme tersebut perlu diimbangi dengan pendekatan yang lebih progresif dan adaptif terhadap keterbatasan akses masyarakat terhadap teknologi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Kaplan dan Norton (2018), yang menekankan pentingnya inklusi digital sebagai bagian dari strategi organisasi.

Studi ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa kombinasi antara pendekatan digital dan tatap muka dapat menjadi model yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat di konteks lokal. Strategi ini tidak hanya memperluas jangkauan tetapi juga memastikan inklusivitas.



5. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis strategi yang diterapkan oleh Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat pasca-implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik. Berdasarkan hasil penelitian, lima dimensi strategi menurut teori Henry Mintzberg—plan, ploy, pattern, position, dan perspective—telah diterapkan dengan berbagai tingkat efektivitas. Strategi yang dirancang cukup sistematis, termasuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Namun, kendala seperti keterbatasan anggaran, distribusi informasi yang belum merata, dan akses masyarakat terhadap teknologi masih menjadi tantangan signifikan.

Kontribusi teoretis penelitian ini adalah perluasan penerapan teori strategi Mintzberg dalam konteks organisasi publik di tingkat lokal, khususnya pada kebijakan keterbukaan informasi publik. Studi ini menekankan pentingnya strategi yang adaptif dan kontekstual dalam menghadapi tantangan lokal, seperti keterbatasan akses teknologi dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Temuan ini juga memberikan dasar bagi pengembangan model partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dan dinamis, dengan mengintegrasikan pendekatan digital dan tatap muka secara seimbang.

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi DPRD Provinsi Lampung untuk meningkatkan efektivitas strategi melalui optimalisasi anggaran, penggunaan teknologi berbasis komunitas, serta pelibatan masyarakat secara lebih mendalam dalam pengambilan keputusan. Penekanan pada kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain dapat menjadi solusi untuk memperluas jangkauan kebijakan dan memastikan keberlanjutan partisipasi publik.

Untuk penelitian mendatang, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas kombinasi strategi komunikasi digital dan langsung dalam konteks lokal yang berbeda. Selain itu, penelitian yang mengukur dampak partisipasi masyarakat terhadap kualitas kebijakan secara kuantitatif juga dapat memberikan perspektif baru dalam memahami hubungan antara keterlibatan masyarakat dan efektivitas kebijakan publik.

Penelitian ini menegaskan bahwa strategi organisasi yang inklusif, adaptif, dan berbasis data dapat menjadi katalisator penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik tidak hanya berfungsi sebagai alat transparansi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement* (5th ed.). Jossey-Bass.
- Grant, R. M. (2019). *Contemporary strategy analysis: Text and cases* (10th ed.). Wiley.
- Hill, C. W., Jones, G. R., & Schilling, M. A. (2019). *Strategic management: Theory: An integrated approach* (12th ed.). Cengage Learning.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2018). *The balanced scorecard: Translating strategy into action*. Harvard Business Review Press.
- Mintzberg, H. (1987). The strategy concept I: Five Ps for strategy. *California Management Review*, 30(1), 11–24. <https://doi.org/10.2307/41165263>
- Tanaka, K. (2022). Strategic management in the public sector: Applying Mintzberg's five Ps framework. *Public Administration Review*, 82(3), 456–470. <https://doi.org/10.1111/puar.13465>
- Wheelen, T. L., Hunger, J. D., Hoffman, A. N., & Bamford, C. E. (2018). *Strategic management and business policy: Globalization, innovation, and sustainability* (15th ed.). Pearson.
- Damanik, R. (2023). Keterbukaan informasi publik: Tantangan dan peluang di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 5(2), 45–60. <https://doi.org/10.12345/jtg.2023>
- Syafari, M. (2024). Peran sekretariat DPRD dalam mendorong keterlibatan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 33–48.